



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MENUJU KOMPETENSI ABAD 21

PENDAHULUAN



Kurikulum 2013 (K-2013) merupakan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang: Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif melalui penguatan Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan yang terintegrasi (Paparan Mendikbud, 2014). K-2013 merupakan kurikulum yang ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi abad 21. Oleh karena itu, K-2013 telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun ajaran 2013/2014 dan sempat mengalami moratorium di tahun ajaran 2015/2016. Pada tahun 2016, K2013 direvisi dengan menambahkan empat poin penting yaitu Literasi, ketrampilan abad 21 (4C), pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/HOTS), dan penguatan pendidikan karakter (PPK). Pelaksanaan kembali K2013 revisi 2016 dilaksanakan secara bertahap mengikuti peta jalan K2013, dimana diharapkan pada tahun 2019 seluruh satuan pendidikan telah mengimplementasikan K2013.

Pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya mulai dari persiapan hingga pelaksanaan K2013. Akan tetapi, sejak pelaksanaan K2013, masih belum banyak evaluasi yang dilakukan terhadap keterlaksanaan K2013 di sekolah. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbangbuk, Kemendikbud di tahun 2019 berupaya kembali menggambarkan keterlaksanaan K2013 dari sisi persiapan maupun pelaksanaan. Naskah Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian dari Puslitjakdikbud berdasarkan tinjauan sistematis terhadap berbagai hasil studi, kajian dari Puslitjakdikbud, kajian INOVASI serta laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat teknis terkait.

TANTANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013



1. Penyediaan Buku Teks

Meskipun pelaksanaan K2013 telah berjalan lebih dari lima tahun, penyediaan buku teks masih serinui aplikasi SIPLah, namun aplikasi tersebut belum efektif untuk mencegah keterlambatan. Faktor lainnya adalah keterbatasan jangkauan sosialisasi tentang BSE Kemendikbud. Sebagian besar sekolah tidak mengetahui bahwa sekolah dapat mengunduh BSE dari situs Kemdikbud. (Puslitjakdikbud, 2018a).g terlambat sampai ke sekolah (Puslitjakdikbud, 2018a, Laporan Monev Dit. PSMA dan Laporan Monev Dit. PSD tahun 2018, Laporan Kegiatan Pemantauan K2013 Tahun 2019 di SDN 23 Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah). Kesulitan sekolah di dalam

Pemantauan K2013 Tahun 2019 di SDN 23 Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah). Kesulitan sekolah di dalam memesan buku terbitan Kemendikbud menjadi salah satu faktor utama keterlambatan tersebut. Sekolah memesan buku melalui aplikasi SIPLah, namun aplikasi tersebut belum efektif untuk mencegah keterlambatan. Faktor lainnya adalah keterbatasan jangkauan sosialisasi tentang BSE Kemendikbud. Sebagian besar sekolah tidak mengetahui bahwa sekolah dapat mengunduh BSE dari situs Kemdikbud. (Puslitjaldikbud, 2018a).

2. Kesesuaian Buku Teks dengan Kurikulum

Kesesuaian buku teks dengan kurikulum dilihat untuk buku teks kelas 4 jenjang sekolah dasar. Terdapat dua aspek yang dinilai yakni model pengembangan buku teks tematik terpadu dan kesesuaian buku pelajaran kelas 4 dengan kebijakan kurikulum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam buku teks: (1) tidak ditemukan keterangan bagaimana integrasi dalam pembelajaran; dan (2) tidak ditemukan bagaimana pengaturan dan isi Muatan Kurikulum yang harus dimasukkan ke dalam Buku Teks terkait Perspektif NKRI (muatan wajib dan konteks lokal).

3. Pelatihan PTK yang Belum Berkualitas

Berdasarkan tinjauan dari beberapa hasil kajian dan monitoring, sebagian besar PTK tidak memahami konsep dan praktek pembelajaran HOTS, umpan balik, model pembelajaran IBL, DBL, PJBL, STEM dan strategi metakognisi. Tidak hanya guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah pun masih banyak yang kurang memahami K2013 sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melakukan supervisi pembelajaran kepada guru (Puslitjaldikbud 2017b, 2018b, 2018c, INOVASI 2019a).

Ketidaksiapan instruktur, keterbatasan waktu dan materi pelatihan; serta keterbatasan jangkauan pelatihan juga merupakan beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pelatihan PTK. (Puslitjaldikbud 2016a, 2017b, 2018b, 2018 c, 2019a). Pemahaman dan kompetensi instruktur yang beragam mengakibatkan kebingungan peserta karena instruktur satu dengan yang lain memberikan penjelasan yang berbeda (Puslitjaldikbud 2016a). Sebagian instruktur di daerah juga mengakui bahwa mereka belum memahami K-2013 secara mendalam karena baru dilatih seminggu sebelum melatih guru (Puslitjaldikbud 2016a, 2017b). Instruktur seringkali tidak memberikan umpan balik kepada guru sehingga guru tidak mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai amanat K2013 atau belum. Contoh dalam hal penyusunan soal HOTS (Puslitjaldikbud 2018b).



Keterbatasan waktu pelatihan, menurut PTK peserta pelatihan, menyebabkan materi K2103 tidak penuh tersampaikan oleh instruktur. Beberapa materi yang ada di buku panduan tidak disampaikan atau hanya sekilas disinggung oleh instruktur. Hal-hal tersebut juga menjadi factor penyebab keterbatasan pemahaman guru.

Materi pelatihan lebih dominan pada sisi administrasi perangkat pembelajaran dibandingkan substansi K2013. Guru mengakui bahwa sebagian besar materi pelatihan adalah tentang penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pelatihan pengawas dan kepala sekolah lebih banyak terkait administrasi tentang teknis supervisi dan akreditasi sekolah. Sumber belajar bagi PTK terkait materi K-2013 juga masih dirasa kurang oleh mereka. Materi tentang substansi tidak terlalu mendalam

Keterbatasan jangkauan pelatihan menyebabkan hanya sebagian PTK memperoleh pelatihan K-2013. Pelatihan K2013 menjangkau seluruh sekolah tetapi tidak seluruh guru, di setiap sekolah akan dipilih perwakilan guru mata pelajaran tertentu atau guru kelas tertentu. Hal ini mengakibatkan dalam satu sekolah pemahaman guru akan k2013 mungkin tidak sama.

Berdasarkan pengakuan guru, keberadaan kelompok kerja guru (KKG) untuk guru SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk guru SMP, SMA, dan SMK sebagai forum diskusi guru dapat menjadi alternatif pelatihan dan peningkatan kompetensi guru (Puslitjaldikbud 2017a). KKG juga dapat menjadi wadah bagi pengembangan keprofesian guru berkelanjutan (INOVASI 2019b). Akan tetapi, baik KKG maupun MGMP di sekolah masih mengalami banyak kendala keberlangsungannya. MKKS dan MPPS sebagai forum diskusi bagi kepala dan pengawas sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas mereka.

PELAKSANAAN KURIKULUM 2013



1. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran (RPP) yang diamanatkan dalam Permendikbud 22 tahun 2016 tentang Standar Proses setidaknya memuat komponen HOTS, model-model pembelajaran saintifik, strategi metakognisi, dan rancangan penilaian. Hasil Monitoring Direktorat Pembinaan SMP tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah merumuskan indikator pencapaian kompetensi terkait LOTS dan HOTS. Kegiatan pembelajaran inti dalam RPP yang disusun guru sebagian besar telah memuat pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inkuiri, dan pembelajaran berbasis masalah. Sebagian besar guru juga telah memuat rancangan penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dan rancangan penilaian untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar (Hasil Monev Dit. PSMP, 2018). Namun perlu diingat bahwa monitoring tersebut baru mencakup 150 sekolah terbaik dari seluruh SMP di seluruh Indonesia. Hasil monitoring Direktorat Pembinaan SMA juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru mengakui telah menyusun soal HOTS dalam rancangan penilaian dan telah membuat kartu soal dalam rancangan penilaian (Lap. Monev Dit. PSMA, 2018). Monev SMA dilakukan di 60 sekolah terbaik.



Hasil kajian dengan mengambil sampel sekolah secara acak menunjukkan bahwa baru sebagian kecil guru SD dan SMP yang memuat tentang pembelajaran HOTS, strategi metakognisi, model pembelajaran saintifik, dan umpan balik (Puslitjaldikbud 2017b, 2018 a, 2018b).

2. Pelaksanaan pembelajaran

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran bermuatan HOTS baru sedikit terlihat di sekolah sampel (Puslitjakdikbud 2017b). Pembelajaran saintifik yang diamati di kelas masih bersifat terbimbing, dimana lebih banyak masukan guru dan belum datang dari ide siswa (Puslitjakdikbud, 2018b). Selain itu, Guru melaksanakan strategi metakognisi dengan kualitas dan kuantitas yang bervariasi (Puslitjakdikbud, 2018c).



Dalam hal ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran, diketahui bahwa baru sebagian sekolah yang memiliki kelengkapan seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan laboratorium Komputer (Puslitjakdikbud, 2018 b). Terkait pemanfaatan sarana pendukung tersebut, diketahui bahwa sebagian sekolah yang memiliki kelengkapan sarana tersebut belum tentu memanfaatkannya. Keberadaan sarana pendukung tersebut hanya untuk melengkapi akreditasi sekolah (Puslitjakdikbud, 2018 b). Laboratorium berubah fungsi menjadi ruang kelas biasa, siswa diajak belajar di laboratorium tetapi jarang yang memanfaatkan alat peraga/KIT di laboratorium (Puslitjakdikbud, 2018 b).

3. Penilaian pembelajaran

Permendikbud 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengamanatkan bahwa: 1) penilaian pembelajaran dilakukan secara otentik; 2) penilaian pembelajaran mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap; serta 3) penilaian aspek pengetahuan meliputi tingkatan kognitif mulai dari C1 (mengingat) sampai C6 (mencipta).

Permendikbud
Nomor 22
Tahun 2016



Hasil Monitoring direktorat Pembinaan SMP tahun 2018 menunjukkan bahwa separuh guru dari sekolah sampel telah melakukan penilaian sikap dengan teknik penilaian antar teman. Cakupan Proses kognitif pada Penilaian Pengetahuan lebih banyak menyentuh aspek mengingat, menjelaskan, dan mengaplikasikan (C1-C3) Cakupan Penilaian Keterampilan (Kecakapan abad 21): sudah terlihat pada sebagian besar guru yang diobservasi.



Hasil Monitoring SMP 2018
Menunjukkan

Sepuluh Guru dari
Sekolah Sample
telah melakukan penilaian
sikap dengan penilaian
antar teman,

50%

REKOMENDASI



1. Kemendikbud perlu segera penyederhanaan terhadap mekanisme penyediaan buku teks pelajaran kurikulum 2013
2. Balitbang Kemendikbud memperketat proses seleksi buku teks Kurikulum agar tidak terjadi lagi miskonsepsi. Balitbang Kemendikbud juga perlu menyusun pedoman pengembangan buku terpadu yang berisi muatan dalam rangka perspektif NKRI secara lengkap.
3. Ditjen GTK memperbaiki pedoman pelatihan K-2013, dimulai dari proses seleksi instruktur melalui mekanisme Lulus/Tidak Lulus, calon instruktur yang lulus seleksi yang akan mengikuti pelatihan. Proses pelatihan Instruktur perlu diperbaiki mekanisme akhir adalah layak dan tidak layak. Kompetensi dan pemahaman Instruktur menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelatihan Kurikulum 2013. Penjadwalan pelatihan ditata sedemikian rupa sehingga tidak menumpuk di satu periode yang mengakibatkan instruktur maupun yang dilatih (Kepala sekolah, guru, pengawas) tidak fokus.
4. Penerbitan aturan hukum untuk memperkuat peran dan fungsi KKG, MGMP, MKKS, dan MPPS
5. Ditjen Dikdasmen menyediakan modul-modul sebagai sumber belajar bagi guru, terutama terkait dengan pembelajaran dan penilaian HOTS, penilaian sikap, ketrampilan
6. Balitbang Kemendikbud perlu mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi ketercapaian Kurikulum 2013

DAFTAR RUJUKAN



Direktorat Pembinaan SMA. Laporan Monev Dit. PSMA dan Laporan Monev Dit. PSD tahun 2018 tentang Implementasi Kurikulum 2013



Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Penyusun:
Fransisca Nur'aini
Etty Sisdiana
Yendri Wirda
Sisca Fujianita

**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.